

**STUDI KASUS PERMASALAHAN KOPERASI YANG  
ADA DI INDONESIA:  
KOPERASI LANGIT BIRU**



**Disusun Oleh :**

Kelompok 4:

Ilham Agung Pangestu (2306223660)	Sutan Excel (2306217664)
M. Dzakwan Amanullah (2306167470)	Desti Kusuma Putri (2306229746)
Wisnu Hardianto (2306225666)	Yona Liza Venusya (2306217664)

**Mata Kuliah :**

Pengantar Hukum Bisnis B

**FAKULTAS PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**2024**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis dengan judul “KASUS PELANGGARAN HUKUM KOPERASI LANGIT BIRU”. Shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sholallahu'alaihi wassalam yang syafa'atnya kita nantikan kelak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rianto dan teman-teman atas dukungan yang telah diberikan untuk menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Oleh karena itu, kami kami mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan dan kesalahan dari makalah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 1 Maret 2024

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Masalah .....	3
1.3 Tujuan .....	4
1.4 Landasan Teori.....	5
<b>BAB II ISI.....</b>	<b>9</b>
2.1    PT Koperasi Langit Biru .....	9
2.2    Awal Kecurigaan .....	11
2.3    Puncak Permasalahan .....	12
2.4    Penyelesaian Permasalahan .....	15
2.5    Upaya Pasca Kasus .....	16
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
3.1 Kesimpulan .....	18
3.2 Saran .....	20
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebelum berdiri menjadi Koperasi Langit Biru, koperasi ini bernama PT Transindo Jaya Komara (PT TJK). Mereka mengelola daging dan hasil peternakan dan bekerja sama dengan 62 penyuplai daging sapi. Perusahaan itu milik Jaya Komara, seorang mantan penjual kerupuk.

Setelah itu, TJK berubah nama menjadi Koperasi Langit biru atau KLB pada bulan Januari tahun 2011. Seluruh kegiatan Koperasi Langit Biru dipusatkan di sebuah kantor yang bertempat di Perum Bukit Cikasungka Blok ADF Nomor 2-4, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang; dan kantor cabang di Jalan BKT Raya, Gang Swadaya VI Nomor 1 RT 008/RW 001, Rawa Bebek, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Jaya Komara dalam koperasi ini memiliki posisi tertinggi, yaitu Direktur Utama dalam Koperasi Langit Biru. Untuk menarik investor, PT Koperasi Langit Biru menawarkan dua paket investasi, yakni investasi paket kecil dan investasi paket besar. Untuk investasi paket kecil setara dengan nilai Rp. 385.000 atau setara dengan harga 5 kilogram daging sapi dan untuk investasi paket besar dengan nilai senilai Rp. 9.200.000 atau setara dengan 100 kilogram daging sapi.

Pada awalnya, Koperasi Langit Biru beroperasi seperti biasa, memberikan bonus dan keuntungan kepada para investor. Namun, setelah enam bulan, pembayaran bonus tiba-tiba berhenti. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tangerang Kabupaten mengungkap bahwa dana investasi senilai Rp6 triliun telah digelapkan. Pemilik koperasi, Jaya Komara, diduga menggunakan uang tersebut untuk keuntungan pribadi.

Cara kerja : Jaya Komala, pemilik Koperasi Gedung Langit, menjanjikan keuntungan berupa uang tunai dan bahan pokok kepada investor yang berinvestasi.

Namun, setelah enam bulan beroperasi dengan sukses, pembayaran bonus ditangguhkan pada awal tahun 2012.

Investigasi: Penyidik Polda Tangerang mencoba menuntut manajemen dengan tuduhan pencucian uang.

Mereka juga mencari bukti bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan mencari istri kedua Pemilik Koperasi 1 sebagai bagian dari penyelidikan.

Lisensi : Berdasarkan Lisensi , pengurus Koperasi Langit Bir tidak boleh memungut investasi dari pelanggan untuk jangka waktu dua tahun atau sampai dinyatakan sebagai koperasi maju1.

Kasus ini menarik perhatian karena berdampak pada banyak nasabah dan dana sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi investor. Aktivitas penyerahan bonus akhirnya berhenti pada bulan Januari tahun 2012 sehingga mereka akhirnya melaporkan kasus ini pada pihak yang terkait (Polres Kabupaten Tangerang). Kasus penipuan dan penggelapan ini akhirnya dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

## 1.2 Pokok Masalah

Koperasi Langit Biru (KLB) adalah sebuah koperasi yang bergerak di bidang pengelolaan daging sapi dan hasil peternakan. KLB menawarkan program investasi dengan imbal hasil yang tinggi kepada para nasabahnya, yaitu sekitar Rp 1,4 juta dan bahan pokok senilai Rp 350 ribu per bulan untuk setiap paket investasi senilai Rp 10 juta. Namun, sejak awal tahun 2012, KLB tidak lagi membayarkan keuntungan kepada nasabahnya dan diduga melakukan penggelapan dana investasi senilai Rp 6 triliun milik 125 ribu nasabah. Kasus ini menimbulkan kerugian besar bagi para nasabah dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada September 2012, pemilik KLB, Jaya Komara, ditemukan tewas di dalam mobilnya dengan luka tembak di kepala. Penyebab kematian Jaya Komara masih menjadi misteri hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan KLB dapat menarik minat nasabah untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang tidak wajar?
2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh KLB dalam mengelola dana investasi nasabah dan apa saja indikasi adanya tindak pidana penggelapan dan pencucian uang dalam kasus ini?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan oleh kasus KLB bagi para nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional?
4. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang dalam menangani kasus KLB dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan?
5. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan?

### 1.3 Tujuan

Maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menjawab pokok-pokok masalah yang telah diuliskan sebelumnya, berikut adalah tujuan dari penulisan makalah ini:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Koperasi Langit Biru dapat menarik minat nasabah untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang tidak wajar.
2. Memaparkan modus operandi yang dilakukan oleh Koperasi Langit Biru dalam mengelola dana investasi nasabah dan indikasi adanya tindak pidana penggelapan dan pencucian uang dalam kasus ini.
3. Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan oleh kasus Koperasi Langit Biru bagi para nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional.
4. Menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang dalam menangani kasus Koperasi Langit Biru dan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penuntutan.
5. Membujuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan dengan memberikan saran dan rekomendasi yang sesuai

## 1.4 Landasan Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa definisi koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi. Didalam koperasi dilakukan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Koperasi dijalankan sesuai aspirasi dan kebutuhan bersama untuk seluruh anggota. Kebutuhan tersebut diutamakan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip dasar koperasi.

Mohammad Hatta juga mendefinisikan koperasi sebagai lembaga tempat usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan sistem tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seseorang untuk semua dan semua untuk seorang.

Maka dengan kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah salah satu pilar perekonomian di Indonesia, karena koperasi bergerak dibidang keuangan, maka hukum yang mengikatnya sudah pasti sangat banyak dan terperinci. Berikut adalah beberapa hukum yang mengatur operasional koperasi:

### **a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berisi:**

- Pasal 1, ayat:
  1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  2. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    - a. Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka;
    - b. Pengelolaan secara demokratis oleh anggota;
    - c. Keterbatasan pembagian hasil atau laba;
    - d. Pembinaan pendidikan koperasi;
    - e. Kerja sama antarkoperasi; dan
    - f. Pengutamakan kepentingan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum.
- Pasal 2, ayat:
  1. Setiap koperasi berhak mendirikan, menjalankan, dan mempertahankan kegiatan usahanya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Setiap koperasi wajib memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban anggota, kegiatan usaha, dan keuangan koperasi.
- Pasal 3, ayat:
    1. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah badan hukum.
    2. Koperasi sebagai badan hukum mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota, pengurus, dan badan pengawas koperasi.
  - Pasal 4, ayat:
    1. Setiap koperasi harus mempunyai anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
    2. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit: Keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka;
      - a. Nama dan tempat kedudukan koperasi;
      - b. Nama, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal pendiri koperasi;
      - c. Nama, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal anggota koperasi;
      - d. Tujuan koperasi;
      - e. Hak dan kewajiban anggota;
      - f. Kegiatan usaha koperasi;
      - g. Modal koperasi;
      - h. Pembagian hasil atau laba;
      - i. Pembentukan dan pelaksanaan badan pengawas;
      - j. Pelaksanaan rapat anggota;
      - k. Cara mengubah dan melaksanakan anggaran dasar; dan
      - l. Dasar-dasar penggabungan dan pemecahan koperasi.

**b) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Standar Akuntansi Keuangan Koperasi yang berbunyi:**

- Pasal 1, ayat:
  1. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan dan meminjam dengan anggotanya.

2. Koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut koperasi.
- Pasal 2, ayat:
    1. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib berbentuk koperasi primer.
    2. Koperasi dapat memiliki unit-unit usaha simpan pinjam di wilayah yang berbeda dengan persetujuan Rapat Anggota.
  - Pasal 3, ayat:
    1. Pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memperhatikan: Nama dan tempat kedudukan koperasi;
      - a. Nama, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal pendiri koperasi;
      - b. Nama, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal anggota koperasi;
    2. Persyaratan pendirian dan pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
  - Pasal 4, ayat:
    1. Pengesahan pendirian koperasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
      - a. Akta pendirian koperasi;
      - b. Pengesahan Dewan Pengawas koperasi; dan
      - c. Persetujuan Rapat Anggota.
    2. Akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memuat:
      - a. Nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal pendiri;
      - b. Nama, jenis kelamin, dan tempat tinggal anggota;
      - c. Tujuan koperasi;
      - d. Kegiatan usaha koperasi;
      - e. Modal koperasi;
      - f. Pembagian hasil atau laba;
      - g. Pembentukan dan pelaksanaan Dewan Pengawas;
      - h. Pelaksanaan rapat anggota;
      - i. Cara mengubah dan melaksanakan anggaran dasar; dan
      - j. Dasar-dasar penggabungan dan pemecahan koperasi.

**c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Koperasi Simpan Pinjam yang berbunyi:**

- Pasal 1:  
Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- Pasal 2:  
Pedoman Umum Akuntansi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi koperasi di Indonesia, dan pembina koperasi pemerintah, pemerintah Provinsi, Kabupaten dan/Kota serta pihak-pihak lain yang terkait. Khusus untuk usaha simpan pinjam, akuntansi koperasi diatur tersendiri.
- Pasal 3:  
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB II**

### **ISI**

#### **2.1 PT Koperasi Langit Biru**

Koperasi Langit Biru (KLB), yang didirikan oleh Jaya Komara, seorang pengusaha yang beralih profesi dari penjual kerupuk menjadi pelaku bisnis di industri multi level marketing (MLM), telah mengemuka sebagai subjek kontroversi yang signifikan. KLB, yang beroperasi di sektor pendanaan usaha pengolahan daging hasil peternakan, telah menjalin kerjasama dengan tidak kurang dari 62 supplier daging, menunjukkan jaringan distribusi yang luas dan potensi pertumbuhan yang signifikan.

Dengan menawarkan dua paket investasi yang berbeda—paket kecil dengan nilai investasi Rp 385.000, setara dengan harga 5 kilogram daging, dan paket besar dengan nilai investasi Rp 9,2 juta, setara dengan 100 kilogram daging sapi—KLB menarik perhatian para investor yang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari industri daging yang berkembang. Paket investasi kecil menjanjikan profit harian sebesar Rp 10.000, dengan pembagian Rp 9.000 untuk perusahaan dan Rp 1.000 untuk investor, menghasilkan total profit bulanan sebesar Rp 150.000 bagi investor.

Namun, ketika KLB gagal memenuhi janji pembayaran bonus kepada investor, kepercayaan dan harapan yang telah dibangun mulai runtuh. Investor yang merasa dirugikan tidak tinggal diam dan melaporkan KLB ke Polres Tangerang Kabupaten, memicu penyelidikan yang mendalam terhadap praktik bisnis KLB. Penyidik Kepolisian Resor Tangerang Kabupaten kini tengah berupaya keras untuk menjerat pengelola KLB dengan pasal pencucian uang, menyusul dugaan penggelapan dana investasi yang mencapai jumlah astronomis senilai Rp6 triliun dari 125 ribu nasabah.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap koperasi. Meskipun telah muncul indikasi bahwa KLB mungkin tidak menjalankan perannya dengan baik, tampaknya belum ada tindakan yang cukup tegas dari pihak berwenang untuk mencegah masalah ini. Hal ini menunjukkan celah dalam sistem pengawasan yang ada dan kebutuhan mendesak untuk reformasi.

Lebih jauh lagi, kasus KLB menegaskan pentingnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Banyak investor yang tergiur oleh janji imbal hasil yang tinggi tanpa mempertimbangkan risiko yang terkait, akhirnya menemukan diri mereka terperangkap dalam praktik investasi yang meragukan. Kasus ini menjadi peringatan keras tentang bahaya dari investasi yang tidak sehat dan pentingnya melakukan due diligence sebelum menanamkan modal.

Dalam skala yang lebih luas, kasus KLB mengungkapkan kerentanan sektor keuangan kita terhadap praktik yang tidak sehat. Ini menuntut upaya yang lebih besar dan lebih terkoordinasi untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap sektor keuangan, termasuk koperasi, untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga integritas sistem keuangan.

## **2.2 Awal Kecurigaan**

Pada awal kuartal keempat tahun 2011, diketahui bahwa penyaluran dana paket investasi kepada investor mulai mengalami “kemacetan”. Banyak investor mengaku mendapatkan dana mereka melewati tenggat yang disepakati, dengan adanya “kemacetan” ini akhirnya mulai muncul desas-desus dan kecurigaan dikalangan para investor PT Koperasi Langit Biru.

Kecurigaan ini semakin menguat dengan laporan keuangan PT Koperasi Langit Biru yang dianggap “abu-abu”. Didalam laporan ada banyak pengeluaran yang tidak terbukti dan tidak jelas asal-usulnya. Terdapat salah satu investor yang mengaku tidak mendapatkan dividen mulai bulan November tahun 2011. Ada juga yang mengaku mendapatkan dividen kurang dari kesepakatan yang disetujui.

Kecurigaan ini akhirnya sampai pada titik dugaan kasus dengan menghilangnya Jaya Komara sebagai Direktur Utama PT Koperasi Langit Biru.

## 2.3 Puncak Permasalahan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu adalah Ada beberapa faktor yang membuat Koperasi Langit Biru (KLB) dapat menarik minat nasabah untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang tidak wajar: Imbal Hasil Tinggi: KLB menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi, yaitu sekitar Rp 1,4 juta dan bahan pokok senilai Rp 350 ribu per bulan untuk setiap paket investasi senilai Rp 10 juta. Imbal hasil yang tinggi ini menjadi daya tarik utama bagi nasabah untuk berinvestasi. Kurangnya Pengetahuan Investasi: Banyak nasabah yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang investasi. Hal ini membuat mereka mudah tergiur oleh imbal hasil yang tidak wajar.

Kepercayaan terhadap Lembaga: KLB sebagai sebuah koperasi mungkin dianggap lebih dapat dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan lembaga investasi lainnya. Ini bisa jadi karena koperasi dianggap lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki nilai-nilai kekeluargaan. Promosi dan Marketing: Strategi promosi dan marketing yang dilakukan oleh KLB juga dapat mempengaruhi minat nasabah untuk berinvestasi. Misalnya, dengan melakukan promosi secara intensif atau memberikan bonus dan hadiah kepada nasabah. Faktor Psikologis: Faktor psikologis juga berperan dalam menarik minat nasabah untuk berinvestasi. Misalnya, rasa ingin cepat kaya, rasa takut ketinggalan kesempatan, atau rasa percaya terhadap janji-janji manis yang diberikan oleh KLB.

Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor di atas membuat KLB dapat menarik minat nasabah untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang tidak wajar.

Jaya Komara dalam koperasi ini juga memiliki posisi tertinggi, yakni Direktur Utama. Untuk menjaring investor, PT KLB menawarkan dua paket investasi, yakni investasi paket kecil dan investasi paket besar. Investasi paket kecil bernilai Rp 385.000 atau setara dengan harga 5 kilogram daging dan investasi paket besar dengan nilai Rp 9,2 juta atau sama dengan 100 kilogram daging sapi.

Profit yang didapat pada investasi paket kecil yang ditawarkan KLB adalah Rp 10.000 per hari. Angka itu akan dibagi kepada perusahaan Rp 9.000, sementara investor Rp 1.000. Dengan demikian, dalam satu bulan, investor mendapat profit sebesar Rp

150.000. Adapun investasi paket besar dibagi lagi ke dalam dua pilihan, yakni investasi non-Bonus Kredit Sepeda Motor (BKSM) yang bonusnya senilai Rp 1,7 juta per bulan (dari bulan ke-1 sampai ke-9). Memasuki bulan ke-10, investor akan langsung mendapat bonus Rp 12 juta. Pada bulan ke-24, investor juga dijanjikan akan mendapat keuntungan Rp 31,2 juta. Dengan tawaran yang menggiurkan itu, KLB akhirnya berhasil menghimpun 125.000 anggota dengan nilai total investasi mencapai Rp 6 triliun. Pihak KLB menjanjikan bahwa dana investasi itu akan diputar untuk menjalankan bisnis di daerah Tulung Agung, Jawa Timur.

Namun, dari hasil penelusuran aparat kepolisian, bisnis di Tulung Agung ternyata tidak menghasilkan dan selama ini KLB bekerja gali lubang-tutup lubang atau hanya mengandalkan uang setoran investor baru yang masuk untuk membayar bonus investor lama. Aktivitas penyerahan bonus akhirnya macet pada bulan Januari 2012 sehingga sejumlah investor mengadukan persoalan ini ke Polres Tangerang Kabupaten. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan KLB pun kini sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

Kasus ini sangat merugikan berbagai pihak, berikut adalah beberapa pihak yang diketahui mengalami kerugian akibat penipuan ini:

a) Nasabah

Kerugian Finansial: Sekitar 125 ribu nasabah mengalami kerugian akibat dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Dana investasi senilai Rp6 triliun yang mereka tanamkan dalam koperasi tersebut terancam hilang<sup>1</sup>.

Hilangnya Kepercayaan: Nasabah kehilangan kepercayaan terhadap koperasi secara masif. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi di masa depan.

b) Masyarakat

Modal Sosial Berkurang: Banyaknya koperasi bermasalah mengakibatkan hilangnya modal sosial yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Kehilangan kepercayaan pada koperasi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Lemahnya Perlindungan: Kasus seperti ini menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat terkait investasi dan keuangan.

c) Perekonomian Nasional

Reputasi Buruk: Maraknya kasus koperasi yang gagal bayar dan penipuan dapat merusak reputasi koperasi secara keseluruhan. Ini berdampak pada kepercayaan investor dan stabilitas sektor keuangan nasional.

Kerugian Besar: Kerugian finansial yang mencapai triliunan rupiah dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan mengurangi daya beli masyarakat.

## 2.4 Penyelesaian Permasalahan

Dalam menangani kasus ini, berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh pihak berwenang:

a) Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Kabupaten berusaha menjerat pengelola Koperasi Langit Biru dengan pasal pencucian uang. Mereka menyelidiki dugaan penggelapan dana investasi senilai Rp6 triliun yang dimiliki oleh 125 ribu nasabah.

Penyidik harus membuktikan tersangka dengan pasal primer terkait penggelapan uang. Mereka juga mencari bukti apakah penerimaan uang itu disalahgunakan untuk keuntungan pribadi.

Selain itu, penyidik berusaha menemukan keberadaan istri kedua dari pemilik Koperasi Langit Biru.

b) Kendala yang Dihadapi

Kurangnya Izin Operasional: Koperasi Langit Biru sebenarnya belum berizin untuk melakukan operasi simpan-pinjam. Izinnya hanya serba usaha. Namun, mereka melakukan penarikan dana dari masyarakat di luar izin yang diberikan.

Kaburnya Petinggi: Para petinggi Koperasi Langit Biru kabur setelah ribuan anggota dan investor merusak kantor karena bonus yang tak lagi diterima.

Raibnya Dana: Uang miliaran hingga triliunan rupiah milik investor tiba-tiba saja raib.

Keterbatasan Investigasi: Meskipun telah memeriksa banyak saksi, termasuk pegawai koperasi dan pegawai Dinas Koperasi Provinsi Banten, investigasi masih menghadapi kendala dalam mengungkap seluruh fakta.

## 2.5 Upaya Pasca Kasus

Meskipun menghadapi tantangan, aparat berwenang terus berupaya untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan dalam kasus ini. Juga demi mencegah terulang kembalinya kasus serupa dimasa mendatang, berbagai langkah antisipasi dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Berikut adalah bentuk upaya tersebut:

### a) Penguatan Pengawasan

Pemerintah dan lembaga pengawas harus memperketat pengawasan terhadap koperasi dan lembaga keuangan. Ini melibatkan audit rutin, pemantauan transaksi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

### b) Transparansi dan Akuntabilitas

Koperasi harus wajib menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akurat kepada anggota dan otoritas terkait. Informasi tentang investasi dan penggunaan dana harus mudah diakses oleh anggota.

Lembaga keuangan juga harus memastikan transparansi dalam operasional mereka dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah.

### c) Pendidikan Keuangan

Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang investasi dan risiko yang terkait. Pendidikan keuangan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana mengelola keuangan mereka dengan bijaksana dan mengenali tanda-tanda potensi penipuan.

### d) Perlindungan Konsumen

Pemerintah harus memperkuat perlindungan konsumen terkait investasi dan keuangan. Ini termasuk mengatur hak-hak konsumen, menegakkan hukum terhadap praktik penipuan, dan memberikan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa.

### e) Kolaborasi Antar Lembaga

Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini.

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan.

f) Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat

Kampanye sosialisasi dan pendidikan publik perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi ilegal dan pentingnya memilih lembaga keuangan yang terpercaya.

Ingatlah bahwa pencegahan kasus seperti Koperasi Langit Biru memerlukan kerjasama dari semua pihak dan komitmen untuk menjaga integritas sistem keuangan. Semua langkah di atas harus diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Makalah ini telah menyajikan analisis mendalam tentang kasus Koperasi Langit Biru (KLB), yang telah menjadi subjek kontroversi akibat dugaan penggelapan dana investasi yang signifikan. KLB, yang berawal dari industri multi level marketing (MLM) dan berkembang ke sektor pendanaan usaha pengolahan daging, menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar namun juga risiko yang tinggi bagi investor.

Kasus Koperasi Langit Biru (KLB) berfokus dalam masalah serius dalam pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan, khususnya koperasi. Kasus ini mencerminkan kerentanan sektor keuangan terhadap praktik yang tidak sehat, seperti penggelapan dana dan janji imbal hasil yang tidak realistis. Pentingnya literasi keuangan dan melakukan due diligence sebelum berinvestasi menjadi peringatan yang penting bagi masyarakat.

Kegagalan KLB dalam memenuhi janji pembayaran bonus kepada investor telah memicu penyelidikan yang mendalam dan upaya penjeratan pengelola dengan pasal pencucian uang. Ini menunjukkan celah dalam sistem pengawasan yang ada dan menegaskan perlunya reformasi.

Lebih lanjut, kasus ini menyoroti pentingnya literasi keuangan di kalangan masyarakat untuk menghindari terperangkap dalam investasi yang meragukan. Edukasi yang secara menyeluruh, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat diperlukan untuk mengurangi risiko investasi. Sistem whistleblowing yang efektif dan penegakan hukum yang tegas akan memperkuat kepercayaan publik dan mencegah kejadian serupa di masa depan dan restrukturisasi manajemen yang memadai juga menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, kasus KLB menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi dan memilih lembaga keuangan yang kredibel. Ini

juga menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan ekosistem keuangan yang sehat dan transparan. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan, kita dapat meminimalisir risiko penipuan dan membangun kepercayaan dalam sektor keuangan.

Dengan upaya bersama dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas, kita dapat meminimalisir risiko penipuan dan memastikan keberlangsungan ekosistem keuangan yang sehat dan transparan di masa depan.

### 3.2 Saran

Untuk mencegah kejadian serupa dengan kasus Koperasi Langit Biru, peningkatan pengawasan oleh regulator menjadi kunci, diiringi dengan transparansi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Edukasi yang komprehensif bagi anggota dan masyarakat akan mengurangi risiko investasi, sementara sistem whistleblowing yang efektif dapat mengungkap tindakan tidak etis lebih dini. Penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik, dan restrukturisasi manajemen yang memadai akan menjamin pengelolaan koperasi oleh individu yang berintegritas.

Akhirnya, dengan transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan, kita dapat meminimalisir risiko penipuan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan ini. Maka, berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan untuk menghindari terulang kembalinya kasus serupa:

a) Penguatan Pengawasan

Pemerintah dan lembaga pengawas harus memperketat pengawasan terhadap koperasi dan lembaga keuangan. Ini melibatkan audit rutin, pemantauan transaksi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

b) Transparansi dan Akuntabilitas

Koperasi harus wajib menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akurat kepada anggota dan otoritas terkait. Informasi tentang investasi dan penggunaan dana harus mudah diakses oleh anggota.

Lembaga keuangan juga harus memastikan transparansi dalam operasional mereka dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah.

c) Pendidikan Keuangan

Masyarakat perlu diberikan edukasi tentang investasi dan risiko yang terkait. Pendidikan keuangan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana mengelola keuangan mereka dengan bijaksana dan mengenali tanda-tanda potensi penipuan.

d) Perlindungan Konsumen

Pemerintah harus memperkuat perlindungan konsumen terkait investasi dan keuangan. Ini termasuk mengatur hak-hak konsumen, menegakkan hukum terhadap praktik penipuan, dan memberikan akses ke mekanisme penyelesaian sengketa.

e) Kolaborasi Antar Lembaga

Pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan.

f) Sosialisasi dan Kesadaran Masyarakat

Kampanye sosialisasi dan pendidikan publik perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi ilegal dan pentingnya memilih lembaga keuangan yang terpercaya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Database Peraturan Negara Republik Indonesia (2012). *Pedoman Umum Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161651/permenkop-ukm-no-04permkukmvii2012-tahun-2012>.
- Database Peraturan Negara Republik Indonesia (1992). *Perkoperasian*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2016). *Perluasan Elemen Efek Dalam Kegiatan Pasar Modal Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Bagi Masyarakat Dari Kontrak Investasi Yang Tidak Terdaftar Di Bursa*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Otoritas Jasa Keuangan, Term of Reference (2015). *Focus Group Discussion terhadap kasus kasus yang sedang di tangani Satuan Tugas Waspada Investasi*. Jakarta OJK RI.
- Asril. Sabrina (2012). *Inilah Modus Investasi Bodong ala Koperasi Langit Biru dan PT GAN*. Jakarta: Kompas.com. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2012/06/07/16480393/Inilah.Modus.Investasi.Bodong.ala.Koperasi.Langit.Biru.dan.PT.GAN?page=all#page2>.
- Triatmojo. Yuwono, Gumilar. Teddy (2012). *Ini Pengakuan Mantan Petinggi Koperasi Langit Biru*. Jakarta: Kontan.co.id. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-pengakuan-mantan-petinggi-koperasi-langit-biru>
- Ant (2012). *Tersangka Kasus Koperasi Langit Biru Dibidik Pasal Money Laundering*. Jakarta: Hukumonline.com. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tersangka-kasus-koperasi-langit-biru-dibidik-pasal-money-laundering-lt4fcf8642c6891/>